

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK DI ASIA TENGGARA
(STUDI KASUS *BELT AND ROAD INITIATIVE*)**



ANDI AXL AZSLAM FADILLAH

E13116316

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK DI ASIA TENGGARA
(STUDI KASUS *BELT AND ROAD INITIATIVE*)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI AXL AZSLAM FADILLAH

E 131 1 6316

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI ASIA TENGGARA

NAMA : ANDI AXL AZSLAM FADILLAH

NIM : E13116316

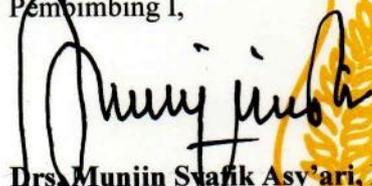
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 9 Agustus 2023

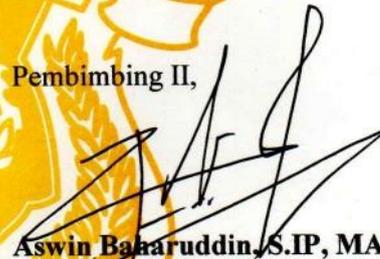
Mengetahui :

Pembimbing I,



Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.
NIP. 196304241991031002

Pembimbing II,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 498407032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK DI ASIA TENGGARA

N A M A : ANDI AXL AZSLAM FADILLAH

N I M : E13116316

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 21 Juli 2023.

Ketua : Drs. Munjin Sya'fik Asy'ari, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Axl Azslam Fadillah
NIM : E13116316
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1 (Sarjana)

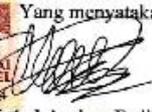
Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI ASIA TENGGARA (STUDI KASUS *BELT AND ROAD INITIATIVE*)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,

(Andi Axl Azslam Fadillah)

ABSTRAK

Andi Axl Azslam Fadillah, (E13116316), “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Republik Rakyat Tiongkok di Asia Tenggara (Studi Kasus *Belt and Road Initiative*)”, dibawah bimbingan **Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP., MA** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Tiongkok dalam realisasi kebijakan BRI (*Belt and Road Initiative*) di Kawasan Asia Tenggara dan dampak strategi realisasi BRI (*Belt and Road Initiative*) Tiongkok di negara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Tiongkok dalam realisasi kebijakan BRI (*Belt Road Initiative*) di kawasan Asia Tenggara adalah dengan mempromosikan kerangka kerjasama ‘2+7’ melalui gagasan *Maritime Silk Road*; melakukan realisasi berbagai proyek BRI di negara Kawasan Asia Tenggara ke dalam 12 bidang pembangunan; menginvestasikan *Foreign Direct Investment* (FDI) ke berbagai negara di negara Kawasan Asia Tenggara dalam rangka realisasi proyek BRI; serta melakukan kerjasama dengan ASEAN dan UNDP dalam realisasi Agenda Pembangunan SDG’s 2030 dan Visi ASEAN 2025 di Kawasan Asia Tenggara. Adapun dampak strategi realisasi BRI (*Belt and Road Initiative*) Tiongkok di negara Filipina, Malaysia, dan Indonesia adalah Di Filipina, terjadi peningkatan perekonomian akibat meningkatnya pembangunan infrastruktur di bidang pariwisata (jumlah wisatawan), jumlah ekspor yang meningkat signifikan terhadap Tiongkok, serta dapat menangani 8 poin dari poin agenda pembangunan SDG’s; Di Malaysia, terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai mata uang Ringgit Malaysia, adanya investasi sejumlah proyek infrastruktur oleh Tiongkok terhadap Malaysia, serta dapat menangani 8 poin dari poin agenda pembangunan SDG’s; Di Indonesia, terjadinya peningkatan kerjasama ekonomi dan infrastruktur antara Indonesia dan Tiongkok, terbantunya implementasi visi Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo, terjadinya defisit perdagangan dengan Tiongkok, neraca perdagangan total Indonesia yang memburuk akibat peningkatan impor terhadap Tiongkok, meningkatnya utang Pemerintah Indonesia, terjadinya defisit keseimbangan promer fiskal serta dapat menangani 8 poin dari poin agenda pembangunan SDG’s.

Kata Kunci: Tiongkok, BRI, ASEAN

ABSTRACT

Andi Axl Azslam Fadillah, (E13116316), "Policy for the Sustainable Development of the People's Republic of Tiongkok in Southeast Asia (*Belt and Road Initiative Case Study*)", under the guidance of **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si** as supervisor I and **Aswin Baharuddin, S.IP., MA** as advisor II in the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine Tiongkok's strategy in the realization of BRI (Belt and Road Initiative) policies in the Southeast Asia Region and the impact of the realization of Tiongkok's BRI (Belt and Road Initiative) strategy in the Philippines, Malaysia and Indonesia. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative research method with a descriptive approach, data collection techniques are in the form of literature review sourced from various books, journals, documents, articles, newspapers, as well as from electronic media such as the internet and reports related to research. This.

The results of this study indicate that Tiongkok's strategy in realizing the BRI (Belt Road Initiative) policy in the Southeast Asian region is to promote the '2+7' cooperation framework through the idea of the Maritime Silk Road; carry out the realization of various BRI projects in Southeast Asian countries into 12 areas of development; investing Foreign Investment (FDI) to various countries in the Southeast Asian Region in the context of realizing the BRI project; as well as cooperating with ASEAN and UNDP in the realization of the SDG's 2030 Development Agenda and the 2025 ASEAN Vision in the Southeast Asia Region. The impact of Tiongkok's BRI (Belt and Road Initiative) realization strategy in the Philippines, Malaysia and Indonesia is that in the Philippines, there has been an increase in the economy due to increased infrastructure development in the tourism sector (number of tourists), a significant increase in the number of exports to Tiongkok, and being able to handle 8 points from the SDG's development agenda points; In Malaysia, there has been an increase in economic growth and an increase in the value of the Malaysian Ringgit currency, there has been investment in a number of infrastructure projects by Tiongkok in Malaysia, and can handle 8 points from the SDG's development agenda; In Indonesia, there was an increase in economic and infrastructure cooperation between Indonesia and Tiongkok, the implementation of President Joko Widodo's vision of the World Maritime Fulcrum was facilitated, a trade deficit with Tiongkok, Indonesia's total trade balance worsened due to increased imports to Tiongkok, increased Indonesian Government debt, a balance deficit fiscal promoter and can handle 8 points of SDG's development agenda points.

Keywords: Tiongkok, BRI, ASEA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Konsep Kebijakan Luar Negeri	14
B. Konsep Kerjasama Internasional	19
BAB III	
GAMBARAN UMUM	29
A. Gambaran Umum Mengenai Implementasi <i>Belt Road Initiative</i> Tiongkok di Asia Tenggara.....	29
B. Perkembangan Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>) di Kawasan Asia Tenggara	43
C. Gambaran Umum Mengenai Implementasi Proyek BRI Tiongkok di Negara ASEAN	
52	
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Strategi Tiongkok dalam Realisasi Kebijakan BRI (<i>Belt and Road Initiative</i>) di Kawasan Asia Tenggara	63
B. Dampak Strategi Realisasi BRI (<i>Belt and Road Initiative</i>) Tiongkok di Filipina, Malaysia dan Indonesia.....	76
BAB V	
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Jalur Belt and Road Initiative Tiongkok	34
Gambar 3 2 Proyek BRI Tiongkok di ASEAN	37
Gambar 3 3 Jumlah penumpang, melalui udara, di ASEAN, 2016 dan 2020	48
Gambar 3 4 Volume pengangkutan, melalui udara, di ASEAN, 2016 dan 2020	49
Gambar 3 5 Volume pengangkutan, melalui laut, di ASEAN, 2016 dan 2020	50
Gambar 3 6 tingkat lapangan kerja manufaktur sebagai proporsi dari total lapangan kerja di ASEAN, 2016 dan 2020 (%)	51
Gambar 3 7 Proporsi populasi yang tercakup oleh jaringan seluler di ASEAN, 2016 dan 2020 (%)	52
Gambar 3 8 Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Filipina	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Ekspor Filipina ke Tiongkok Tahun 2014-2019.....	58
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang terbilang unik di dunia sebab negara-negara Asia Tenggara memiliki sumber daya wisata budaya alam, nyata dan tidak berwujud yang kaya dan beragam, beberapa situs warisan alam dan warisan budaya tertulis pada *UNESCO World Heritage List* yang menyoroti dan mencerminkan warisan uniknya, serta diliputi oleh warisan alamnya berupa budaya etnis endemik yang kaya dan beragam dengan hamparan pengaruh Arab, Tiongkok, India, dan Eropa (ASEAN, 2015). Selain itu, Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling dinamis dan paling cepat berkembang di dunia. Dengan PDB gabungan sebesar USD 2,767 triliun, kawasan ini mencakup pasar yang terdiri dari 646 juta orang dan menarik hampir seperlima arus masuk FDI global setiap tahunnya. Selama lima tahun ke depan, pertumbuhan diperkirakan akan tetap kuat di Asia Tenggara, dengan rata-rata 5,2% (OECD, 2019). Adanya prospek tersebut tentu menjadikan negara-negara di Asia Tenggara dapat membuat suatu kerangka kerjasama regional dalam suatu organisasi regional yang dikenal sebagai ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).

Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah berkembang menjadi negara adidaya yang dapat mempengaruhi tatanan politik global. Sebagai negara dengan tingkat industri yang maju, politik luar negeri Tiongkok cukup mempengaruhi beberapa wilayah di dunia dengan strategi yang

terbilang proaktif di berbagai wilayah Asia dan Afrika. Fenomena ini terbilang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan dan pengaruh Tiongkok telah tumbuh sebagai kekuatan baru (Wang, 2005). Motivasi untuk meningkatkan aktivitas politik dalam tatanan dunia pasca perang dingin datang melalui pembentukan berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral (Cheng, 2002). Singkatnya, kekuatan politik dan ekonomi Tiongkok saat ini telah mampu “menantang” dominasi Barat di beberapa benua.

Hal ini dapat dilihat keterlibatan Tiongkok di wilayah Asia dan Afrika. Di wilayah Afrika, investasi asing Tiongkok telah meningkat secara fundamental sehingga mengubah *Landscape* fisik dan politik benua tersebut (Tiboris, 2019), bahkan keterlibatannya di wilayah Afrika telah tumbuh secara signifikan sehingga berpotensi mengalahkan Inggris dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar. Adapun untuk wilayah Asia, khususnya Asia Selatan dan Tenggara, Tiongkok telah membangun kerjasama “*Belt and Road Initiative*” dan telah bergabung dalam beberapa hubungan kerjasama yang strategis dengan organisasi regional di wilayah tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tiongkok telah meningkatkan pembangunan dalam negerinya secara signifikan sehingga keberadaannya dapat diakui sebagai kekuatan baru di beberapa wilayah.

Adapun kebijakan “*Belt and Road Initiative*” di kawasan Asia terkhusus di kawasan Asia Tenggara dimulai sejak masa kepemimpinan Deng Xiaoping dimana pada saat itu kebijakan ekonomi dan militer yang

berwawasan mulai diterapkan sejak tahun 1990-an. Selanjutnya menyusul keberhasilan pemerintah Deng Xiaoping dalam mendekati negara-negara Asia Tenggara dengan ASEAN, Xi Jinping selaku pemimpin Tiongkok saat itu memperkenalkan inisiatif "*One Belt One Road*" pada tahun 2013 yang menjadi "*Belt and Road Initiative*" pada tahun 2015. Inisiatif tersebut dimulai ketika Xi Jinping mengunjungi beberapa negara di kawasan Asia Tengah dan negara-negara ASEAN sepanjang tahun 2013 hingga 2015.

Meskipun inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan konektivitas kawasan serta memperkuat hubungan infrastruktur, perdagangan, dan investasi antara Tiongkok dan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, Tiongkok juga perlu untuk mempertahankan kebijakan tersebut agar kepentingan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dapat terealisasi di kawasan tersebut. (Damayanti, 2019). Kebijakan Tiongkok terkait dengan *Belt Road Initiative* tentu berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan proyek-proyek yang dilakukan oleh Tiongkok, berkenaan dengan kerangka *Belt Road Initiative* tersebut yang ingin direalisasikannya di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut tentu akan memiliki dampak yang signifikan bagi negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Diketahui bahwa Tiongkok telah memiliki program *the 21st Century Maritime Silk Road*, bahkan sejak tahun 2013, Tiongkok telah menempatkan Asia Tenggara pada pusat tujuan geopolitiknya dan telah mengembangkan serangkaian inisiatif untuk mencapai peningkatan integrasi dengan Asia

Tenggara di beberapa tingkatan. Perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok pun telah mencapai \$288 miliar pada paruh pertama tahun 2019 dan telah mengubah ASEAN menjadi mitra dagang kedua Tiongkok, sementara Tiongkok juga telah menjadi mitra dagang pertama bagi ASEAN.

Selain itu, Tiongkok juga telah melakukan berbagai *project* di beberapa negara di Asia Tenggara yaitu Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Filipina. *Project* tersebut pun telah terbagi kedalam 12 bidang pembangunan yaitu bandara; pembangkit listrik tenaga batu bara; Zona Kerjasama Ekonomi; kerjasama pendidikan dan kebudayaan; Transmisi listrik; Pembangkit listrik tenaga air; Kawasan industri; Pelabuhan; Rel Kereta Api; Energi daur ulang; Jalan; dan Kota Cerdas; serta terdiri dari 53 *project*. Dalam pelaksanaannya pun, terdapat 25 *project* yang sedang berlangsung, 6 *project* yang diberhentikan, 3 *project* yang masih dalam tahap negosiasi, serta 19 *project* yang telah diselesaikan. Namun dari pelaksanaan *project* tersebut, terdapat empat negara yang memiliki *project* lebih banyak dari negara lainnya di Asia Tenggara yaitu Filipina dengan 13 *project*; Malaysia dengan 8 *project*; dan Indonesia & Vietnam sebanyak 7 *project* (Angela Tritto, 2020).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pembahasan tersebut dengan judul penelitian yaitu **”Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Asia Tenggara”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan *Belt Road Initiative* Tiongkok dalam rentang tahun 2015 hingga 2020 di negara-negara kawasan Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia dan Indonesia sebab banyaknya proyek yang dilakukan oleh Tiongkok di negara tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Tiongkok dalam realisasi kebijakan BRI (*Belt Road Initiative*) di kawasan Asia Tenggara?
2. Bagaimana dampak strategi realisasi BRI (*Belt Road Initiative*) Tiongkok di negara Filipina, Malaysia dan Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui strategi Tiongkok dalam realisasi kebijakan BRI (*Belt Road Initiative*) di kawasan Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui dampak strategi realisasi BRI (*Belt Road Initiative*) Tiongkok di negara Filipina, Malaysia dan Indonesia.

Adapun mengenai manfaat penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian akademik dan praktisi yaitu sebagai berikut.

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan kontribusi, bagi studi hubungan internasional, terutama bagi peneliti, khususnya yang mengkaji mengenai “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan RRT di Asia Tenggara”.
2. Bagi praktisi, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penelitian tersebut dan memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami mengenai strategi dan dampak strategi Tiongkok dalam realisasi BRI (*Belt Road Initiative*) di kawasan Asia Tenggara.

D. Kerangka Konseptual

Dalam memudahkan penulisan, peneliti mengambil dua konsep yaitu Konsep Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Kerjasama Internasional. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan kedua konsep tersebut. Dalam menganalisis rumusan masalah pertama maupun kedua, terlebih dahulu peneliti akan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dalam menganalisis dan memahami kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam kerangka kerja BRI di Asia Tenggara sehingga dengan ini dapat memudahkan peneliti dalam meneliti strategi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam realisasi BRI di Asia Tenggara. Kemudian peneliti menggunakan konsep Kerjasama Internasional untuk memahami dampak dari strategi realisasi BRI Tiongkok di negara kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara Filipina, Malaysia dan Indonesia.

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Dalam mengidentifikasi realisasi kebijakan BRI (*Belt Road Initiative*) di Asia Tenggara, terlebih dahulu peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri sebagaimana menurut Perwita dan Yani yang mengkonsepsikan kebijakan luar negeri kedalam tiga konsepsi yaitu sebagai seperangkat orientasi, sebagai strategi dan sebagai bentuk perilaku (Yani A. A., 2005). Kemudian, untuk memudahkan analisis maka peneliti akan mengidentifikasi bentuk atau tindakan kebijakan luar negeri sebagaimana menurut Holsti yang membedakan tindakan dalam kebijakan luar negeri kedalam empat tindakan yaitu Diplomasi; Propaganda; Ekonomi; Intervensi; Persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti K. , 1981).

Kemudian terakhir adalah dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, hal ini sebagaimana menurut Jesmine Ahmed yang mengategorikan faktor penentu dalam kebijakan luar negeri kedalam dua faktor yaitu determinasi internasional atau eksternal dan yang lainnya adalah determinasi domestik atau internal. Mengenai faktor eksternal yang menentukan suatu kebijakan luar negeri suatu negara adalah sistem internasional, struktur kekuasaan, hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, serta kekuatan militer atau perlombaan senjata; sedangkan faktor internal utama adalah latar belakang sosial-ekonomi, militer, kemampuan ekonomi, masing-masing perbedaan mereka berdampak langsung pada proses pembuatan

kebijakan luar negeri dan keputusan kebijakan luar negeri (Ahmed, 2020).

2. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang membangkitkan minat, dimana apabila masyarakat paham akan pentingnya jaringan kerjasama yang luas di antara aktor-aktor sosial yang beragam tentu distribusi barang atau komoditas yang berasal dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya lebih dapat terkelola menjadi sebuah produk jadi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Menurut asal katanya, kerjasama berarti bekerja sama, bekerja dengan, yang mengandaikan bahwa harus ada lebih dari satu orang atau badan yang terlibat dalam suatu kegiatan produktif (Cittolin, 2018). Dalam bidang ekonomi, Arroyo menunjukkan bahwa kerjasama adalah konstruksi budaya yang didasarkan pada interaksi sosial, di mana tujuan bersama, tindakan dibagi dan keuntungan didistribusikan secara seimbang di seluruh sistem (Arroyo, 2008). Menurut Afonso, kerjasama dalam politik adalah penciptaan mekanisme dan pembentukan ikatan solidaritas, “kerangka kerjasama, kolaborasi dan bantuan pembangunan” untuk mengimbangi perbedaan antara negara maju dan negara berkembang (Afonso, 1995).

Menurut Krisna dalam Muchtadi (Muchtadi, 2022), kerjasama internasional dapat dipahami sebagai kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua atau beberapa aktor internasional untuk berinteraksi dalam bidang, mekanisme dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam merealisasikan kerjasama internasional, terdapat tiga kerangka kerjasama yaitu

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang hanya ditandatangani oleh dua negara dan merupakan perjanjian kontraktual.
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara yang berlokasi dalam satu kawasan yang sama, bersifat *Law Making Treaty* terbatas (perjanjian yang meletakkan suatu ketentuan atau kaidah tertentu bagi masyarakat internasional) dan perjanjian kontraktual.
3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu, bersifat internasional dengan bersifat *Law Making Treaty* (perjanjian yang meletakkan suatu ketentuan atau kaidah tertentu bagi masyarakat internasional).

Dalam suatu kerjasama internasional yang dilakukan, setiap negara yang terlibat dalam proses tersebut (kerjasama internasional) dapat saling mendistribusikan manfaat dari sumber daya yang mereka miliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga distribusi tersebut dapat berpotensi mengurangi ketimpangan antara

negara maju dan negara berkembang. Singkatnya, terjadi pemerataan sumber daya yang dimiliki tiap negara sehingga berpeluang dalam mempercepat pembangunan ekonomi dunia dan meningkatkan kualitas hidup setiap negara di dunia (Umaira, 2022).

3. Kerangka Pikir

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat bahwa dalam menganalisis bagaimana strategi Tiongkok dalam realisasi kebijakan BRI di Asia Tenggara, terlebih dahulu peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri untuk mengidentifikasi realisasi kebijakan BRI di Asia Tenggara dan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menganalisis dampak strategi dari realisasi BRI Tiongkok di negara-negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia dan Indonesia agar sesuai dengan konsep Kerjasama Internasional. Kemudian dari hasil analisis tersebut maka peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis

mengenai bagaimana strategi Tiongkok dalam realisasi kebijakan BRI (*Belt Road Initiative*) di Asia Tenggara serta bagaimana dampak strategi Tiongkok dalam realisasi BRI (*Belt Road Initiative*) di negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Malaysia dan Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Republik Rakyat Tiongkok di Asia Tenggara.

2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari sumber pustaka atau kepustakaan serta berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur, *library research* atau studi literatur yang melibatkan beberapa proses yang terstruktur yang digunakan untuk menulis penelitian, membuat presentasi, atau menyelesaikan proyek penelitian tertentu (Bungin, 2020).

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui

suatu perantara. Singkatnya data yang berasal dari hasil pencarian referensi dari buku – buku, artikel, jurnal, artikel berita, juga dokumentasi dan press release yang dikumpulkan dari situs resmi organisasi atau pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Republik Rakyat Tiongkok di Asia Tenggara”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat pula teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan terlebih dahulu meninjau sejumlah dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan melalui berbagai sumber data sekunder sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yaitu berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media elektronik dan elektronik.

Dalam teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan metode Library Research untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melakukan tinjauan terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran dokumen (*library research*). Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada analisis proses berpikir induktif yang terlibat dalam dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan selalu menggunakan

logika ilmiah. Metode Kualitatif dimaksudkan untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, untuk menjelaskan fakta dengan teori yang masuk akal, dan untuk mengembangkan pemahaman tentang satu atau lebih hal berikut ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif di mana peneliti yang terlibat langsung bekerja dengan informan penelitian. Proses penelitian kepustakaan itu sendiri melibatkan pengidentifikasian dan informasi terkait serta menganalisis apa yang peneliti temukan. kemudian mengembangkan dan mengungkapkan ide-ide peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan salah satu kajian di studi Ilmu Hubungan Internasional. Di dalamnya, dipahami bahwa kebijakan luar negeri adalah sebuah kajian yang memiliki cakupan yang cukup kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek eksternal tetapi juga aspek internal negara. Hal ini juga tidak terlepas dari pemahaman bahwa negara selaku entitas utama dalam praktik hubungan internasional yang menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumennya.

Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negeri adalah suatu gagasan dalam suatu rumusan yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah atau membuat dan melakukan suatu perubahan di suatu wilayah (Holsti K. , *International Politics: A Framework for Analysis*, 1983). Adapun menurut Carlsnaes, Kebijakan luar negeri adalah kegiatan dan hubungan eksternal yang direncanakan oleh para pemimpin pemerintahan negara untuk melayani kepentingan nasional negara mereka. Kebijakan luar negeri tentu saja membutuhkan suatu dan berbagai strategi dikarenakan pada dasarnya setiap negara ingin terlibat dalam pergaulan internasional yang tidak dapat mereka kontrol sepenuhnya (Carlsnaes, 2012).

Dalam memahami kebijakan luar negeri, terdapat empat pendekatan yang dilakukan sebagaimana menurut Jackson & Sorensen untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Pertama adalah memahami latar

belakang dan sejarah negara tersebut sehingga memicu lahirnya suatu kebijakan luar negeri mereka. Kedua adalah dengan menguraikan secara komprehensif fokus dan kepentingan negara tersebut. Ketiga adalah dengan menjelaskan bagaimana negara menerapkan strategi mereka dalam mempertahankan eksistensi kebijakan luar negerinya di dunia internasional. Terakhir adalah dengan memperlihatkan dampak (positif dan negatif) yang muncul akibat dari pelaksanaan kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh negara tersebut (Sorensen, 2013). Namun dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tentu memperhatikan tujuan atau kepentingan nasional dari negara itu sendiri sehingga untuk mencapai tujuan dari kepentingan nasionalnya, sebuah negara akan merumuskan strategi dalam kebijakan luar negeri. Alhasil, konsekuensi dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan luar negeri tersebut akan terlihat secara nyata.

Kebijakan luar negeri memiliki berbagai instrumen dalam pelaksanaannya, sebagaimana menurut Holsti yang membagi kebijakan luar negeri kedalam lima instrumen yaitu (i) diplomasi, (ii) propaganda, (iii) ekonomi, (iv) intervensi, dan (v) persenjataan, perang dan pengaruh politik (Holsti K. , 1981).

1. Instrumen Diplomasi

Dalam hal ini, instrumen diplomasi dijadikan sebagai salah satu instrumen negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri sebab diplomasi berkaitan dengan media komunikasi baik dilakukan oleh

seorang diplomat. Namun, dengan perkembangan globalisasi yang cukup signifikan maka instrumen diplomasi juga berkembang dimana tidak hanya melibatkan diplomat saja, melainkan juga masyarakat itu sendiri. Alhasil, perlunya suatu negara untuk mempersiapkan strategi, kemampuan, dan kecakapan yang adaptif agar dapat melakukan diplomasi dengan baik demi tercapainya kepentingan nasional negaranya.

2. Instrumen Propaganda

Propaganda adalah upaya terorganisir oleh beberapa individu atau suatu kelompok dalam membentuk, mengendalikan atau mengubah suatu sikap individu atau kelompok tertentu dengan berbagai media komunikasi yang mereka miliki, dengan tujuan untuk mempengaruhi opini yang ada di masyarakat.

3. Instrumen Ekonomi

Instrumen ekonomi digunakan untuk memperoleh dan mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri negara tersebut dengan memanfaatkan berbagai unsur maupun faktor kebutuhan, ketergantungan dan penawaran akan bonus dan potensi ekonomi yang mereka dapatkan atau dengan mengancam atau memberikan tekanan ekonomi..

4. Instrumen Intervensi

Intervensi Militer diartikan sebagai bentuk campur tangan yang dilaksanakan dengan mengirimkan ekspedisi militer sehingga

berpeluang dalam menunjang suatu pemerintahan yang berkuasa ataupun bahkan dalam membantu suatu kelompok oposisi dalam pemerintahan.

5. Persenjataan, perang dan pengaruh politik

Dalam hal ini, negara menggunakan berbagai instrumen yang melibatkan dan hal-hal yang berhubungan dengan persenjataan, perang dan politik dalam menggapai tujuan dan kepentingan dari negara tersebut.

Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh negara sebagaimana menurut Olton yaitu mencakup:

1. Menginterpretasikan berbagai pertimbangan akan kepentingan nasional negara tersebut ke dalam suatu bentuk tujuan dan sasaran yang diharapkan ingin dicapai secara spesifik.
2. Menetapkan berbagai faktor kontekstual atau situasional di lingkungan domestik dan internasional yang relevan dengan pencapaian dari tujuan kebijakan luar negeri negara yang ingin dicapai.
3. Menganalisis berbagai kemampuan dan kapabilitas nasional negara tersebut secara menyeluruh dengan harapan untuk menjangkau hasil yang hendak dicapai.
4. Mengembangkan berbagai perencanaan atau strategi potensial dengan memanfaatkan kapabilitas dan potensi nasional dalam menanggulangi

berbagai variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan luar negeri yang hendak dicapai..

5. Melaksanakan atau mengeksekusi berbagai tindakan yang telah direncanakan (Olton, 1999).

Menurut Yessi, terdapat tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara (Olivia, 2013).

1. Level sistemik atau level analisis sistem. Level analisis ini menjelaskan mengenai pengaruh distribusi kekuatan antar negara super power terhadap negara-negara lain. Menurut Bruce, Level analisis sistem disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif di antara level analisis yang ada karena “dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka (Starr, 1996). Secara umum, level analisis ini berkaitan dengan distribusi kekuasaan diantara negara-negara, saling ketergantungan ekonomi dan politik negara.
2. Level negara. Level analisis ini menjelaskan mengenai perilaku negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Menurut Rourke, level analisis negara digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Rourke, 1995).
3. Level individu. Level analisis ini fokus pada manusia sebagai actor yang dimana akan menjelaskan mengenai pemahaman akan beragam

faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seorang individu. Dapat disimpulkan juga bahwa level analisis ini digunakan untuk menganalisis bagaimana individu bertinteraksi dalam kelompok (*organizational behavior*) atau bagaimana faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri (*idiosyncratic behavior*) (Rourke, 1995).

B. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang membangkitkan minat, dimana apabila masyarakat paham akan pentingnya jaringan kerjasama yang luas di antara aktor-aktor sosial yang beragam tentu distribusi barang atau komoditas yang berasal dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya lebih dapat terkelola menjadi sebuah produk jadi yang sekiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Iskandar kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya (Iskandar A. , 2021).

Menurut asal katanya, kerjasama berarti bekerja sama, bekerja dengan, yang mengandaikan bahwa harus ada lebih dari satu orang atau badan yang terlibat dalam suatu kegiatan produktif (Cittolin, 2018). Dalam bidang ekonomi, Arroyo menunjukkan bahwa kerjasama adalah konstruksi budaya yang didasarkan pada interaksi sosial, di mana tujuan bersama, tindakan dibagi dan keuntungan didistribusikan secara seimbang di seluruh

sistem (Arroyo, 2008). Selain itu, adapun dalam ranah politik sebagaimana menurut Afonso bahwa kerjasama adalah penciptaan mekanisme dan pembentukan ikatan solidaritas, “kerangka kerjasama, kolaborasi dan bantuan pembangunan” untuk mengimbangi perbedaan antara negara maju dan negara berkembang (Afonso, 1995).

Menurut Iskandar, terdapat beberapa alasan dari terbentuknya sebuah kerjasama yang dilakukan oleh negara terhadap negara lainnya yaitu sebagai berikut (Iskandar A. , 2021):

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Menurut Krisna dalam Muchtadi (Muchtadi, 2022), kerjasama internasional diartikan sebagai adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antar dua atau lebih aktor internasional untuk berinteraksi

dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam merealisasikan kerjasama internasional, terdapat tiga kerangka kerjasama yaitu

1. Kerjasama Bilateral: Perjanjian yang diadakan atau diinisiasi oleh dua Negara. Kerjasama ini bersifat *Treaty Contract* yaitu perjanjian atau kontrak yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban diantara pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian tersebut, seperti perjanjian perdagangan antara dua negara atau perjanjian kerjasama bilateral.
2. Kerjasama Regional: Perjanjian yang diadakan atau diinisiasi oleh beberapa negara yang masih berada dalam kawasan tersebut. Kerjasama ini bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*. *Law Making Treaty* adalah perjanjian yang menjadikan kaidah atau ketentuan hukum internasional secara keseluruhan bagi anggotanya. Sedangkan *Treaty Contract* sebagaimana yang dibahas sebelumnya.
3. Kerjasama Multilateral: Perjanjian yang diadakan atau diinisiasi oleh beberapa negara tanpa adanya batasan kawasan atau wilayah tertentu serta bersifat internasional dan *Law Making Treaty* yaitu perjanjian yang menjadikan kaidah atau ketentuan hukum internasional secara keseluruhan bagi anggotanya

Dalam kerjasama internasional sendiri, berbagai negara saling bertransaksi akan manfaat dari beragam sumber daya mereka baik sumber

daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini juga berpotensi mengurangi ketimpangan yang ada antara negara maju dengan negara berkembang. Singkatnya, hal ini mengakibatkan pemerataan sumber daya yang ada sehingga berpeluang dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi global serta meningkatkan kualitas hidup berbagai negara di seluruh dunia (Umaira, 2022).

Adapun menurut Hara dalam Iskandar, terdapat beberapa tujuan dari terbentuknya kerjasama internasional yaitu sebagai berikut (Iskandar A. , 2021).

1. Mempererat Persahabatan

Dalam kerjasama internasional, tentu saja dampak yang dihasilkan adalah terjadinya hubungan yang baik antar kedua negara yang saling melakukan kerjasama. Secara tidak langsung, menjalin hubungan kerjasama internasional tentu berdampak pada eratnya persahabatan antara negara-negara yang saling melakukan kerjasama sehingga hal ini juga mampu menghindari permusuhan antara negara-negara yang mengikuti kerjasama.

2. Menciptakan Perdamaian Dunia

Perdamaian dunia merupakan salah satu hal yang berusaha untuk dicapai dalam kerjasama internasional. Adanya kerjasama yang terjadi antar negara-negara akan menghasilkan perdamaian antar negara-negara yang saling bekerjasama.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Negara

Telah diketahui bahwa persoalan ekonomi adalah salah satu alasan tiap negara untuk melakukan kerjasama satu sama lain. Salah satu faktor dari banyak negara yang menjalin kerjasama adalah untuk menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Terkhusus kerjasama yang terjadi antara negara berkembang dan negara maju.

4. Memperluas Tenaga Kerja

Berkaitan dengan aspek sebelumnya, pertimbangan ekonomi adalah hal penting dalam melakukan kerjasama internasional. Selain itu, kerjasama internasional juga mampu memperluas tenaga kerja. Dapat dilihat dan diamati bahwa dengan adanya kerjasama antar negara, permasalahan ketenagakerjaan akan dapat diatasi terlebih apabila berkaitan dengan transfer tenaga kerja antar negara seperti TKI/TKA. Namun, pertukaran tersebut bukan hanya menyangkut soal aspek ketenagakerjaan melainkan terdapat pula aspek lainnya seperti pendidikan yang biasanya dapat diidentikkan dalam pertukaran pelajar.

Berkenaan dengan hal tersebut, diketahui bahwa negara-negara ASEAN berupaya untuk mewujudkan Visi ASEAN dan Agenda Pembangunan SDG's 2030. Namun dalam memahami kedua hal tersebut tentu hal ini juga berkaitan dengan konspeksi mengenai pembangunan keberlanjutan yang diagendakan dengan konsep SDG's itu sendiri. Secara historis, konsep mengenai pembangunan berkelanjutan telah menjadi

perhatian para ahli sejak lama. Berselang beberapa tahun kemudian akhirnya perhatian atas konsepsi pembangunan berkelanjutan tersebut semakin diperkuat pasca penerbitan publikasi "*The Limit to Growth*" yang berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi negara dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam nasional. Hal ini disebabkan oleh arus barang dan jasa yang dihasilkan tentu tidak dapat dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*) (Jaya, 2004)

Perhatian terhadap aspek keberlanjutan tersebut pun semakin mencuat kembali pada tahun 1987 ketika *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau dikenal sebagai *Brundland Commission* menerbitkan sebuah buku yang berjudul "*Our Common Future*". Dalam laporannya, nampak keprihatian dunia akan degradasi lingkungan akibat pembangunan yang diungkapkan sebagai berikut.

"Kecenderungan pembangunan masa kini mengakibatkan orang miskin semakin banyak dan mudah terserang penyakit, serta merusak lingkungan. Bagaimana pembangunan yang demikian ini dapat melayani dunia diabad mendatang yang berpenduduk dua kali lipat dan tetap menyandarkan pada lingkungan hidup yang sama ? "

Lahirnya publikasi tersebut kemudian memicu terbentuknya sebuah agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (Jaya, 2004). Adapun definisi mengenai pembangunan yang berkelanjutan adalah sebagai berikut

“Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Pertiwi, 2017)

Namun, Keiner menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut.

“Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternative akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial. Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan. “ (Pertiwi, 2017)

Adapun mengenai pilar dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana menurut Mohan Munasinghe dalam Roger et al (P.P Rogers, 2008) adalah ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Dimana hal ini juga diuraikan oleh Keiner bahwa pilar pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan, ekonomi, dan sosial sehingga muncullah pengembangan akan aspek pembangunan berkelanjutan menjadi empat dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi sosial, serta dimensi intitusional (Kreiner, 2005).

Melengkapi konsep mengenai pembangunan berkelanjutan sebelumnya dimana hal ini sebagaimana menurut Kates, et. al (Robert W. Kates, 2005) yang membagi pembangunan berkelanjutan menjadi dua bagian yaitu apa yang harus dilestarikan dan apa yang harus dibangun. Adapun bagian yang harus dijaga adalah *Nature*, *Life support*, dan *Community* (masyarakat) yaitu budaya, kelompok dan tempat. Adapun

mengenai bagian yang harus dibangun meliputi manusia, ekonomi, dan sosial.

Dalam buku “*Our Common Future*” telah diuraikan lima poin penting tentang arah kebijakan dari konsep *Sustainable Development* yaitu Populasi dan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, industri dan pertumbuhan kota. Hal ini kemudian ditanggapi secara global sehingga PBB dapat mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan secara global pada tahun 2000 hingga 2015 yang disebut *Millennium Development Goals* (MDGs). Kemudian kebijakan tersebut diperkuat dengan adanya kesepakatan dokumen “*The Future We Want*” pada Konferensi Rio ke 20 pada tahun 2012 di Rio Jenairo, Brasil. Dokumen tersebut telah menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional (Pertiwi, 2017). Pasca implementasi MDGs, PBB kemudian mengembangkan pembangunan berkelanjutan yang baru kedalam bentuk SDGs dengan implementasi antara tahun 2015 hingga 2030.

Berdasarkan laporan ICSU tahun 2005 disebutkan bahwa *Sustainable Development Goals* mencakup 17 tujuan yaitu sebagai berikut (ISSC ICSU, 2015):

1. Pengentasan kemiskinan di seluruh dunia
2. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta upaya promosi pertanian berkelanjutan
3. Peningkatan promosi hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta upaya promosi kesempatan belajar seumur hidup.
5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Tercapainya energi yang handal yang didukung dengan akses yang berkelanjutan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat
8. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja dan produktifitas serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Infrastruktur yang handal dan mendorong inovasi pada industri yang berkelanjutan
10. Ketimpangan antar negara yang semakin kecil.
11. Tercapainya kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan
12. Pola produksi dan konsumsi kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan.
13. Upaya praktis untuk mereduksi dampak perubahan iklim.
14. Pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
15. Perlindungan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan penggurunan, pencegahan degradasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati
16. Penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses yang efektif dan akuntabel bagi semua masyarakat.

17. Peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Secara rinci program *Sustainable development goals* terbagi atas enam komponen yaitu sebagai berikut (ISSC ICSU, 2015):

1. *Planet* atau perlindungan ekosistem untuk seluruh masyarakat
2. *People* atau adanya jaminan hidup sehat, pendidikan serta inklusi wanita dan anak anak
3. *Dignity* atau memberantas kemiskinan dan ketidakadilan
4. *Prosperity* atau membangun kemandirian dan transformasi energy
5. *Justice* atau mempromosikan lingkungan yang aman dan damai yang didukung dengan kelembagaan yang kuat.
6. *Partnership* atau mengkatalisasi solidaritas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan.